



Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1971-2001)

Nadif Hanan Narendra^{1*}, Hieronymus Purwanta¹, Nur Fatah Abidin¹

*Corresponding author Email: nadifsolo@gmail.com¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Abstrak: Gus Dur adalah salah satu tokoh yang identik dengan pemikiran pluralismenya. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan pemikiran Gus Dur tentang pluralisme (1971-2001)?. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran Gus Dur tentang pluralisme (1971-2001). Penelitian dilaksanakan dengan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Gus Dur, pluralisme terfokus pada tauhid, hukum (fiqh), dan etika (akhlaq). Kebijakan ini sering menimbulkan kontroversi namun demikian kebijakan pluralisme Gus Dur mampu menghilangkan pengaruh Orde Baru, memulihkan hak asasi para korban diskriminasi seperti korban yang dianggap terlibat dalam partai komunis dan etnis Tionghoa, serta menyelesaikan permasalahan separatisme yang terjadi di Indonesia. Pemikiran pluralism Gus Dur terbentuk berdasarkan dialektika Gus Dur dengan lingkungan sekitarnya mulai dari masa sekolah sampai dengan menjabat sebagai presiden. Meskipun menghasilkan kontroversi, pemikiran pluralisme Gus Dur telah membuka cakrawala bangsa mengenai praktik baik pluralisme yang perlu dilanjutkan pada era saat ini.

Kata Kunci: Gus Dur, Pemikiran Islam, Pluralisme, Ulama.

The Development of Gus Dur's Pluralism Thought (1971-2001)

Abstract: *Gus Dur is well acknowledge as pluralists. The problem this research is how Gus Dur's thoughts on pluralism from 1971 to 2001. This article aims to analyze the development of Gus Dur's thoughts on pluralism from 1971 to 2001. This research used historical method. The research findings show that Gus Dur's thoughts on pluralism were influenced by internal and external factors. According to Gus Dur, pluralism focuses on monotheism, law (fiqh), and ethics (akhlaq). This policy often caused controversy, however, Gus Dur's policy of pluralism was able to eliminate the influence of the New Order, restore the human rights of victims of discrimination such as victims who were considered involved in the communist party and ethnic Chinese, as well as resolve the problems of separatism that occurred in Indonesia. Gus Dur's thought of pluralism was formed based on Gus Dur's dialectic with the surrounding environment from his school days to serving as president. Although it generates controversy, Gus Dur's thinking of pluralism has opened the nation's horizons regarding the good practice of pluralism that needs to be continued in the current era.*

Keywords: Clerics, Gus Dur, Islamic Thought, Pluralism.

PENDAHULUAN

Pasca Reformasi 1998, fokus penelitian dan kajian tertuju pada pluralisme. Indonesia adalah negara bangsa dengan komposisi masyarakat yang mempunyai latar belakang agama, budaya, bahasa, dan etnis suku yang beragam (*plural society*) tetapi dapat menjadi satu dalam bingkai negara bangsa dengan tidak menghilangkan ciri khas dari setiap individu masyarakat (Yusalia, 2008). Menjaga dan menghargai keberagaman menjadi salah satu strategi untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Dengan demikian, agenda terbesar yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta senantiasa membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh masyarakat negara dan umat beragama tanpa melihat perbedaan sebagai permasalahan (Bauto, 2016).

Keberagaman disebabkan faktor geografis yang mana Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas sekitar kurang lebih 3.000 mil dari barat ke timur dan lebih dari 1.000 mil dari selatan ke utara. Selain itu, letak Indonesia dihimpit dua benua dan dua samudera yang mendorong akulturasi secara bertahap dengan pihak-pihak dari luar. Pengaruh dari luar yang paling awal dirasakan masyarakat Indonesia adalah masuknya agama dan kepercayaan yang memengaruhi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia sampai saat ini (Ictiyanto, 2005). Indonesia tidak mungkin bisa dijadikan seragam, sehingga pluralisme merupakan jawaban terbaik dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia (Wahid, 1999).

Upaya penguatan plurasime di Indonesia menghadapi tantangan. Data mengenai intoleransi, kekerasan dan ujaran kebencian dari Wahid Institute sejak tahun 2009-2017 menunjukkan pertambahan kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2009 terjadi 93 kasus yang kemudian bertambah menjadi 135 kasus pada tahun 2010, 184 kasus tahun 2011, 195 kasus tahun 2012, 135 kasus tahun 2013, 111 kasus tahun 2014, 113 kasus tahun 2015, 101 kasus tahun 2016, dan 105 kasus tahun 2017. Sementara itu, tidak jarang terdapat beberapa kasus diskriminasi dan intoleransi yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Berdasarkan data Wahid Institute, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2009-2018 sebanyak 40 kasus (2009), 87 kasus (2010), 122 kasus (2011), 166 kasus (2012), 106 kasus (2013), 80 kasus (2014), 130 kasus (2015), 159 (2016), 90 kasus (2017), dan 130 kasus (2018).

Menjaga dan mewariskan pluralisme kepada seluruh lapisan masyarakat dan generasi muda merupakan tanggungjawab bersama semua pihak. Salah satu pihak yang berperan aktif dalam menjaga dan mengajarkan pluralisme kepada generasi penerus bangsa adalah Nahdlatul Ulama (NU). NU mulai mengembangkan pemikiran mengenai pluralisme berkat sumbangsih Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Nahdlatul Ulama mengembangkan kajian dan penelitian pluralisme melalui dua lembaga khusus yang disebut Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama (P2KB) dan Lembaga Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) dan di dukung oleh Wahid Foundation yang berdiri tahun 2004 dengan tujuan utama untuk menyelesaikan kekerasan yang dipicu oleh perselisihan atas nama agama dan etnis identitas (Rifai'i, 2019).

Berdasarkan data diskriminasi dan intoleransi yang sering terjadi di Indonesia dan dilakukan baik oleh aparat negara maupun bukan, pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme menjadi penting untuk dikaji. Gus Dur menjadi sosok yang dirindukan oleh masyarakat. Kerinduan akan sosok Gus Dur dibuktikan berdasarkan data statistik yang dikumpulkan oleh Prapancha Research selama 2 tahun (2012-2013) yang memberikan hasil bahwa 38% masyarakat merindukan pemikiran mengenai toleransi Gus Dur, 24% masyarakat merindukan pribadi Gus Dur, 16% merindukan pemikiran dan kebijakan politik Gus Dur, 5% guyonan Gus Dur dan 16% sisanya menjawab lain-lain. Hasil tersebut dipertegas oleh pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid, pada acara Haul Gus Dur ke-7 di Jakarta tahun 2017 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia dalam tiga tahun belakangan sedang dilanda diskriminasi etnis dan intoleransi, masyarakat perlu sosok yang mempunyai pemikiran terbuka seperti Gus Dur (Gunawan, 2018).

Penelitian mengenai Gus Dur dan pemikirannya telah banyak dilakukan. Rustina (2008) menganalisis kebijakan Gus Dur dalam menangani permasalahan separatisme di Aceh dengan pluralisme. Nashir (2012) menganalisis usaha Gus Dur dalam memperjuangkan etnis Tionghoa supaya terbebas dari diskriminasi. Sementara itu, Taufani (2018) menjelaskan bahwa gagasan pluralisme Gus Dur adalah suatu gagasan yang lahir dari proses pergumulan yang panjang dan diwarnai dengan percampuran berbagai macam tradisi pemikiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, tiga fokus utama yang dikaji dalam artikel

ini adalah (1) latar belakang pemikiran pluralisme Gus Dur (1945-1949), (2) konsep pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme (1971-1998), dan (3) kebijakan Gus Dur dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara dengan menggunakan pluralisme (1999-2001).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode sejarah. Proses heuristik dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari berbagai macam buku primer, buku sekunder, majalah, arsip, jurnal dan melakukan wawancara yang berhubungan dengan Gus Dur. Pada kritik sumber atau verifikasi yang bertujuan untuk memperoleh keabsahan sumber. Menurut Sjamsudin keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan sumber (Sjamsudin, 1996). Kritik sumber ini dilakukan dengan dua fokus yaitu kritik *ektern* dengan melakukan pengamatan terhadap sumber yang telah diperoleh mulai dari tahun, bentuk tulisan, jenis kertas, penulis dan tahun terbit dan melakukan kritik *intern* dengan memfokuskan pengamatan terhadap isi dari sumber yang telah didapatkan sesuai atau tidak dengan judul yang sedang diteliti.

Setelah data yang diperoleh diseleksi dan diambil data yang memenuhi syarat maka langkah selanjutnya adalah memberi makna dari fakta yang diperoleh, menggabungkan antara satu sumber dengan sumber yang lain kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep yang mendukung (Notosusanto, 1978). Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan penulis adalah membaca semua data yang telah diseleksi secara detail, melakukan pendalaman dan pemahaman materi kemudian menggabungkan fakta-fakta yang ditemukan menjadi satu bagian yang utuh dan bersifat logis dan mampu dipertanggungjawabkan tingkat validitasnya. Langkah terakhir adalah historiografi yaitu, menyampaikan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti-bukti yang telah telah dikumpulkan, dikritik dan sudah dilakukan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1944-1949)

Wahid Hasyim memegang peranan penting dalam perkembangan pemikiran pluralisme Gus Dur. Pada tahun 1944 Gus Dur pertama kali melihat dunia di luar pesantren

ketika diajak Wahid Hasyim untuk tinggal di Jakarta, hal tersebut dikarenakan Wahid Hasyim ditunjuk sebagai ketua *Shumumbu* (Kantor Urusan Agama yang didirikan Jepang) di Jakarta (Barton, 2002). Selama di Jakarta Gus Dur tinggal di kawasan Menteng. Pada zaman penjajahan Jepang kawasan Menteng sedang tumbuh menjadi kawasan paling elite di Indonesia yang menyebabkan Gus Dur hidup di pusat kebudayaan dan pusat keberagaman (Suaedy, 2018). Gus Dur tidak terlalu lama tinggal di Jakarta karena tahun 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Wahid Hasyim segera mengamankan Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang selama kurun waktu 1945-1949.

Setelah resmi menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama, Wahid Hasyim kembali mengajak Gus Dur ke Jakarta pada bulan Desember 1949. Pada periode kedua tinggal di Jakarta ini, Wahid Hasyim mengajak seluruh keluarganya untuk pindah ke Menteng, Jakarta Pusat. Ketika tinggal di Jakarta, Wahid Hasyim lebih memilih untuk memasukkan Gus Dur di sekolah formal dibandingkan dengan pondok pesantren dan memberikan Gus Dur les tambahan bahasa Belanda kepada teman baik Wahid Hasyim yang bernama Williem Bueller (Barton, 2002). Ketika bersama Williem Bueller tersebut Gus Dur pertama kali mengenal budaya Eropa dan mulai menyukai musik klasik Eropa (Suaedy, 2018).

Rumah keluarga Wahid Hasyim yang berlokasi di Menteng dilengkapi dengan perpustakaan pribadi yang lengkap dengan koleksi berbagai macam jenis buku. Perpustakaan tersebut merupakan inisiatif dari Wahid Hasyim dengan tujuan untuk membiasakan anak-anaknya, termasuk Gus Dur, agar mempunyai kebiasaan untuk membaca sehingga mendapatkan pengetahuan yang luas dan menjadikan pemikiran mereka menjadi lebih kritis dan terbuka (Barton, 2002). Perpustakaan pribadi tersebut memberikan akses berbagai macam buku dengan keberagaman pandangan dan pemikiran yang ditulis oleh penulis Islam dan Non-Islam (Suaedy, 2018).

Wahid Hasyim juga mempunyai kebiasaan untuk mengajak Gus Dur ikut dalam beberapa pertemuan, sehingga Gus Dur dapat menyaksikan, berinteraksi dan mendengarkan berbagai macam pandangan dan pendapat dari orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun kebiasaan mengajak Gus Dur ke berbagai macam pertemuan tersebut juga hampir merenggut nyawa Gus Dur. Pada tanggal 18 April 1953, terjadi kecelakaan yang menimpa mobil yang dikendarai Wahid Hasyim

bersama Gus Dur di daerah Cimahi, dalam kecelakaan tersebut Gus Dur berhasil selamat namun ayahnya meninggal dunia pada 19 April 1953 setelah sempat dirawat di rumah sakit (Barton, 2002). Keputusan Wahid Hasyim dalam mengarahkan pendidikan Gus Dur membuat pemikirannya menjadi semakin luas. Gus Dur yang awalnya hanya mempelajari Islam di pesantren kemudian mulai diperkenalkan kepada pendidikan formal yang bersifat sekuler, budaya Eropa dan keberagaman pemikiran dan pandangan yang di dapatkan melalui buku bacaan atau hasil pengamatan, interaksi dan mendengarkan ketika diajak ikut dalam pertemuan. Benih-benih pemikiran pluralisme sudah mulai terbentuk berkat peran dari Wahid Hasyim.

Setelah lulus Sekolah Dasar pada tahun 1953, Gus Dur dikirim untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta tahun 1954. Selama belajar di SMEP tersebut kemampuan Gus Dur dalam membaca semakin meningkat karena sudah mulai mempelajari Bahasa Inggris (Barton, 2002). Kemampuan Gus Dur dalam menguasai Bahasa Inggris mendapatkan bantuan dari Sumatri salah satu guru SMEP yang merupakan anggota Partai Komunis. Sumatri meminjamkan buku karya Lenin "*What is To Be Done*" dan "*Romantisme Revolusioner*" dalam Bahasa Inggris untuk melatih kemampuan Bahasa Inggris Gus Dur. Setelah fasih berbahasa Inggris, Gus Dur kemudian mulai membaca buku-buku dalam yang menggunakan Bahasa Inggris seperti karya Karl Marx yaitu "*Das Kapital*" (Mibtadin, 2021).

Ketika bersekolah di SMEP tahun 1953, Gus Dur melakukan perjalanan berpindah-pindah pondok pesantren yang berada diluar pengaruh Nahdlatul Ulama dan aliran pesantren tradisional. Pada tahun 1953, Gus Dur dititipkan di Pesantren Krapyak yang masih beraliran Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1954 Gus Dur pindah dan memilih tinggal bersama Junaidi seorang tokoh Muhammadiyah yang terkenal dengan aliran Islam yang sudah modern. Selama tinggal bersama Junaidi, Gus Dur mendapatkan pemahaman Islam yang baru khas Muhammadiyah yang lebih terbuka dengan pengetahuan di luar Al-Qur'an dan Kitab Kuning (Suaedy, 2018). Pengalaman Gus Dur berpindah-pindah pesantren tersebut kemudian mengembangkan pemikirannya mengenai agama dan masyarakat.

Setelah lulus SMEP tahun 1957, Gus Dur memutuskan untuk melanjutkan sekolah di Timur Tengah. Selama fase belajar di Timur Tengah antara tahun 1963-1970 Gus Dur lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku dengan memanfaatkan fasilitas yang

tersedia seperti toko buku, perpustakaan universitas, perpustakaan kota hingga Pusat Informasi Amerika Serikat (USIS). Banyak buku yang dibaca Gus Dur namun dari keseluruhan bacaan, Gus Dur sangat tertarik dan fokus dengan sastra Arab, filsafat dan teori-teori pemikiran Emile Durkheim (Mibtadin, 2021).

Gus Dur merasakan pengalaman yang berbeda ketika belajar di Universitas Baghdad tahun 1966. Lingkungan Irak lebih dinamis mengikuti perkembangan pengetahuan dibandingkan dengan Mesir. Hal tersebut membuat Gus Dur antusias dalam proses pembelajaran. Kehidupan Gus Dur di Irak ini juga merupakan pengalaman pertama dimana Gus Dur menjalin hubungan dengan Ramin, seorang Yahudi dari Irak. Gus Dur dan Ramin sering bertemu untuk berdiskusi mengenai agama, filsafat dan politik. Pengalaman berdiskusi dengan Ramin ini membuat Gus Dur mengetahui Yudaisme dan memahami kesengsaraan kaum minoritas yang selalu disiksa dan tidak diakui oleh kaum mayoritas (Barton, 2002). Pengalaman Gus Dur selama belajar di Timur Tengah dari tahun 1963-1970 memberikan wawasan pengetahuan yang membentuk pola pemikiran Gus Dur. Persahabatan dengan Ramin yang merupakan seorang Yahudi menggambarkan bahwa pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme sudah mulai terbentuk dan berkembang di usia remaja.

Setelah selesai belajar di Universitas Baghdad pada tahun 1970, Gus Dur kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan Program Magister di Eropa. Universitas Laiden di Belanda menjadi tujuan utama Gus Dur, namun hal tersebut gagal terwujud karena ijazah Gus Dur dari Universitas Baghdad kurang diakui di Eropa. Setelah dinyatakan tidak bisa melanjutkan pendidikan Program Magister di Eropa, Gus Dur memutuskan untuk tinggal sementara di Eropa. Kesempatan tinggal di Eropa tersebut dimanfaatkan Gus Dur untuk memahami secara langsung sifat masyarakat di Eropa terutama Belanda, Jerman dan Prancis dan juga melakukan diskusi pemikiran Barat langsung dengan masyarakat Eropa (Barton, 2002).

Setelah enam bulan tinggal di Belanda, Gus Dur mencoba untuk mengikuti program seleksi masuk Universitas Kohn dan Universitas Sorbone di Jerman. Gus Dur mencoba mengambil kajian Islam klasik, namun usaha kedua Gus Dur untuk melanjutkan pendidikan di Eropa harus gagal karena terkendala aspek bahasa. Gus Dur belum menguasai bahasa Hebrew, Yunani dan Latin sebagai syarat untuk diterima di kedua universitas tersebut

(Mibtadin, 2021). Kegagalan tersebut belum membuat Gus Dur menyerah. Gus Dur memutuskan untuk sementara waktu bekerja di rumah binantu milik orang Tionghoa ketika di Jerman sambil mengikuti beberapa seminar dari beberapa universitas Eropa (Barton, 2002). Pengalaman Gus Dur berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat Eropa mempengaruhi pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme. Aktivitas sehari-hari Gus Dur ketika bekerja di rumah binantu milik orang Tionghoa menambah luas interaksi keberagaman dan pengalaman Gus Dur dalam menjalani kehidupan dengan kultur budaya, agama dan adat istiadat yang berbeda.

Pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme tidak terbentuk secara langsung dengan sendirinya. Pengalaman hidup dan bantuan dari ayahnya merupakan faktor pendorong yang berhasil membawa Gus Dur untuk mengenal lebih jauh mengenai keberagaman dan tidak hanya terfokus dalam lingkup pesantren yang bersifat homogen. Gus Dur mampu untuk mengembangkan pemikiran khas pesantren mengenai *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dengan pemikiran Islam Timur Tengah dan liberalisme dari Eropa dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemikiran tersebut juga memberikan dampak terhadap kepribadian Gus Dur yang lebih tenang dan tidak kaku dalam memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan kontemporer.

Pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme (1971-1998)

Pemikiran pluralisme sejalan dengan nilai-nilai Pancasila terutama Sila ketiga dan Sila kelima yang berbunyi Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pluralisme menekankan kepada rasa toleransi kepada semua lapisan individu tanpa memandang latar belakang dari setiap individu masyarakat Indonesia. Pluralisme juga sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki arti "Berbeda Namun Tetap Satu" (Barton, 2002).

Pluralisme merupakan bentuk pemikiran dengan tujuan untuk menerima berbagai macam latar belakang manusia yang lain untuk menjalin toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Shihab (2005) dan Wahid (2010) yang dimaksud pluralisme adalah kemampuan untuk menerima bahwa setiap manusia itu berbeda namun mempunyai tujuan yang sama. Menurut Gus Dur yang dikutip Taufani (2018: 202) memaknai pluralisme seperti sebuah rumah besar yang terdapat banyak kamar, masing-masing kamar mempunyai

penghuni. Setiap penghuni kamar mempunyai kebebasan dalam merawat, menghias dan menggunakan kamar untuk melakukan apapun. Namun ketika berkumpul dalam ruang keluarga maka setiap penghuni wajib melebur menjadi satu untuk menjaga kepentingan rumah.

Gus Dur mencoba menemukan jawaban dari berbagai macam persoalan kemanusiaan kontemporer yang terjadi di Indonesia. Konsep pluralisme yang dikembangkan oleh Gus Dur tersusun dari tiga komponen utama yaitu monoteisme (*tauhid*), hukum (*fiqh*) dan etika (*akhlaq*). Komponen tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan manusia supaya saling peduli terhadap manusia yang lain. Konsep pluralisme Gus Dur menekankan proses berpikir dan bertindak yang hasilnya melahirkan toleransi. Toleransi tidak tergantung kepada tingginya tingkat pendidikan formal atau kepintaran seseorang, namun tergantung kepada persoalan hati dan persoalan perilaku (Mibtadin, 2021).

Gus Dur selalu konsisten memperjuangkan pemikiran pluralisme melalui tindakan dan tulisan dari tahun 1971-1998 demi menjaga kesatuan bangsa dan memberikan hak asasi yang sama untuk semua masyarakat Indonesia (Dirdjosisworo, 1999). Konsistensi Gus Dur dalam memperjuangkan pemikiran pluralisme dibuktikan dengan tindakan-tindakan kontroversinya, salah satunya adalah ketika terjadi peristiwa kerusuhan anti-Kristen pada tanggal 10 Oktober tahun 1996 di Situbondo yang menimbulkan korban jiwa sebanyak lima orang. Kerusuhan terjadi karena terdapat oknum yang diadili karena menghina Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa tersebut Gus Dur langsung pergi ke Situbondo dan meminta maaf kepada masyarakat Kristen atas kejadian yang menimpa mereka (Barton, 2002).

Bukti lain bahwa Gus Dur konsisten dalam memperjuangkan pluralisme adalah ketika Gus Dur diundang untuk bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1991. Namun Gus Dur memutuskan untuk menolak. Gus Dur berpendapat bahwa ICMI merupakan bentuk sektarianisme (politik aliran) dan lebih memilih bergabung dengan Forum Demokrasi yang anggotanya terdiri dari berbagai macam agama seperti Islam, Kristen dan Protestan, bahkan ada yang memiliki latar belakang sosialis (Barton, 2002). Kebijakan Gus Dur tersebut membuat mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Gus Dur untuk maju dalam pemilu tahun 1999 (Dirdjosisworo, 1999).

Kebijakan Pluralisme Presiden Gus Dur 1999-2001

Gus Dur resmi menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999 bersama dengan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Ketika Gus Dur resmi menjadi presiden, kondisi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi, separatisme, dan intoleransi. Kondisi tersebut membuat Gus Dur segera mengambil kebijakan yang cepat dan cermat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia (Wicaksana, 2018).

Kekacauan yang terjadi di Indonesia menuntut Gus Dur untuk segera membuat kebijakan politik, namun kebijakan politik tersebut harus memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk segera mengatasi kekacauan dan fokus untuk kembali membangun dan membenahi kehidupan masyarakat di Indonesia (Barton, 2002). Secara teoritik, kebijakan politik presiden bersifat universal yang harus dipatuhi dan ditaati setiap masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, namun tidak jarang sebuah kebijakan menimbulkan pro dan kontra. Menurut Easton (1957) dan Budiardjo (2008), kebijakan merupakan sebuah jawaban untuk permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yang bersifat umum dan bermanfaat.

Tanggal 30 Oktober 1999 Gus Dur mengambil kebijakan politik untuk membubarkan Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos) yang terbukti melakukan korupsi dan digunakan Orde Baru dalam melakukan pembungkaman media dan pers. Kebijakan pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos) tersebut dilakukan untuk memulai proses reformasi dan memastikan pengaruh Orde Baru sudah hilang (Barton, 2002). Pembubaran kedua departemen tersebut bertujuan menghilangkan pengaruh-pengaruh Orde Baru dan mempertahankan reformasi. Selain itu, pembubaran dua departemen tersebut juga merupakan tindakan Gus Dur untuk memberantas korupsi dan mempermudah pers dan media dalam menyampaikan kabar kepada masyarakat. Pemikiran pluralisme Gus Dur menekankan supaya pers dapat menyampaikan berita tanpa ada pihak yang mengekang dan masyarakat berhak untuk menilai berita tersebut objektif atau tidak, sehingga masyarakat mendapatkan berita yang aktual (Ichwanuddin, 2014).

Ketika kontroversi pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos) memanas, Gus Dur kembali membuat kebijakan yang mengejutkan masyarakat Indonesia. Gus Dur mengusulkan Tap MPRS No. XXV/ MPRS/ 1966 mengenai

larangan ajaran Marxisme dan Leninisme untuk dicabut pada tanggal 1 November 1999 (Al-Maududi, 2000). Gus Dur berpendapat bahwa Indonesia sekarang harus fokus menegakkan keadilan sebagai syarat utama demokrasi dan tidak terjebak dengan konflik masa lalu. Langkah pertama adalah melakukan rekonsiliasi terhadap korban-korban yang dianggap terlibat dalam PKI (Ibad, 2012).

Kebijakan pencabutan Tap MPRS No. XXV/ MPRS/ 1966 mendapatkan banyak pertentangan dari berbagai macam organisasi masyarakat, termasuk organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi tersebut secara terang-terangan menolak kebijakan tersebut karena menganggap bahwa Marxisme dan Leninisme identik dengan Atheisme yang bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan Pancasila (Mibtadin, 2021).

Pengamat politik juga mempertanyakan kebijakan tersebut, namun dapat dipahami bahwa Gus Dur menganut pluralisme sehingga menginginkan semua paham dan ideologi dapat hidup bersama tanpa dilarang oleh negara (Al-Maududi, 2000). Komitmen Gus Dur dalam menerapkan pluralisme dengan tujuan untuk membangun kehidupan demokrasi yang penuh toleransi dan harmonisasi dalam masyarakat tetap dipertahankan meski banyak pihak yang mengkritik dan mempertanyakan (Gunawan, 2018). Banyak pendapat yang tidak setuju dengan pencabutan Tap MPRS No. XXV/ MPRS/ 1966, namun Gus Dur tetap percaya dengan pendiriannya. Dua alasan pokok yang melandasi Gus Dur mengajukan gagasan tersebut adalah (1) tidak ada lembaga negara yang melarang perkembangan ideologi dan (2) kebenaran sejarah keterlibatan PKI dalam pembunuhan enam perwira tinggi Angkatan Darat tanggal 30 September perlu diperiksa ulang (Budiawan, 2004).

Kebijakan Gus Dur untuk melakukan rekonsiliasi kepada korban-korban yang dianggap terlibat PKI juga menunjukkan bahwa kebijakan Gus Dur tersebut didasarkan kepada pemikiran pluralisme yang lebih mengedepankan toleransi dan kemanusiaan namun masih sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Gus Dur berusaha mengakhiri diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak bersalah, namun diperlakukan tidak adil dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Pemerintahan Gus Dur juga memperjuangkan dan melindungi hak asasi etnis minoritas seperti etnis Tionghoa, komunitas Sunda Wiwitan, minoritas organisasi masyarakat Budha seperti Komunitas Maha Sangha Indonesia dan Waludi

(Gunawan, 2018). Salah satu etnis minoritas yang diperjuangkan dan dilindungi Gus Dur adalah etnis Tionghoa.

Langkah awal Gus Dur adalah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 mengenai pembatasan agama kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa dan menggantinya dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pembebasan agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa dapat dilaksanakan dengan bebas tanpa izin khusus dari pemerintah. Kemudian direalisasikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 tahun 2001 pada 9 April 2001 yang menetapkan Hari Raya Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif, hanya untuk umat yang merayakan (Chaerudin, 2011).

Kebijakan Gus Dur dalam menangani diskriminasi dan memperjuangkan hak-hak asasi masyarakat Etnis Tionghoa di Indonesia selama menjadi Presiden Indonesia dari kurun waktu 1999-2001 mendapatkan apresiasi dalam wujud pemberian gelar kehormatan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Kelenteng Tay Kek Sie pada tanggal 10 Maret 2004 oleh sejumlah tokoh Tionghoa di Semarang. Acara tersebut berjalan dengan damai, bahkan dalam acara tersebut terlihat Gus Dur masih menjunjung tinggi pluralisme dengan menggunakan baju congson (baju kebesaran Tionghoa) dengan warna merah menyala dan motif kuning (Ibad, 2012).

Konsep pemikiran pluralisme juga dipegang teguh oleh Gus Dur dalam menangani permasalahan separatisme di Indonesia. Gus Dur lebih memilih menggunakan pendekatan yang damai dan komunikatif dibandingkan harus menggunakan kekuatan militer. Gus Dur berpendapat bahwa separatisme di Indonesia sebenarnya tidak ada, yang ada hanya keresahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menanggapi ketidakadilan yang diciptakan oleh pemerintah melalui sistem politik sentralistik dan ototritarianisme pada masa Orde Baru (Suaedy, 2018). Gus Dur menangani separatisme di Aceh dan Papua dengan kebijakan yang manusiawi dengan membuka proses dialog yang menjunjung tinggi demokrasi dan pluralism (Chaerudin, 2011).

Selanjutnya, usaha yang dilakukan Gus Dur mendapatkan respon yang positif dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara sepihak mereka menyatakan siap untuk membuka dialog lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia terkait gerakan separatisme. Gus

Dur meminta bantuan Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator. Pada tanggal 27 Januari 2000 terjadi pertemuan antara Malik Mahmud dan Zaini Abdullah (wakil Gerakan Aceh Merdeka) dengan Hassan Wirayuda (wakil pemerintah Indonesia). Pertemuan ini menghasilkan *Joint of Understanding for Humanitarian Pause for Aceh* atau lebih dikenal dengan Jeda Kemanusiaan (Chaerudin, 2011).

Kebijakan Gus Dur dalam menangani kasus separatisme Papua hampir sama dengan Aceh dengan mengedepankan komunikasi dan kepercayaan. Pada tanggal 31 Desember 1999 sampai 1 Januari 2000, Gus Dur melakukan kunjungan ke Papua dan menginap di daerah Jayapura. Langkah pertama yang dilakukan Gus Dur untuk menunjukkan niat baik kepada masyarakat Papua adalah dengan mengganti nama dari Irian Jaya menjadi Papua kemudian dilanjutkan dengan memberikan izin pengibaran bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol kebesaran budaya dan kebanggaan rakyat Papua sekaligus OPM dengan syarat dikibarkan di bawah bendera Merah Putih (Suaedy, 2018).

Hasil kesepakatan dalam dialog tersebut kemudian ditetapkan oleh Gus Dur secara yuridis melalui Undang-Undang No. 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi Papua (Pekei, 2013). Pada masa pemerintahan Gus Dur Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mulai disusun secara intensif, meskipun kemudian selesai dan ditandatangani dan diundangkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri (Suaedy, 2018). Kebijakan Gus Dur dalam menangani separatisme di Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang paling sukses karena berhasil mempertahankan Aceh dan Papua sebagai bagian dari Indonesia (Barton, 2002).

Gus Dur mencoba membangun dialog untuk menampung berbagai macam aspirasi sehingga dapat mengambil jalan tengah yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak (*win win solution*). Namun kebijakan yang diambil oleh Gus Dur kadang juga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Berikut ini beberapa kebijakan Pemerintahan Gus Dur tahun 1999-2001:

1. Pembubaran Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos).
Pembubaran kedua departemen tersebut dimaksudkan untuk membebaskan pers dalam menulis dan menyiarkan berita kepada masyarakat dan masyarakat mendapatkan kebebasan dalam menilai berita secara objektif. Selain itu juga sebagai upaya untuk menghilangkan pengaruh Orde Baru dan memberantas korupsi.

2. Kebijakan rekonsiliasi dengan korban-korban yang dianggap terlibat PKI. Kebijakan tersebut bermaksud membebaskan orang-orang yang tidak terlibat dalam kejahatan PKI, namun diperlakukan secara tidak adil dengan alasan anggota keluarganya anggota PKI. Sebuah alasan yang sebagian besar tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Kebijakan menangani diskriminasi etnis Tionghoa. Kebijakan tersebut bermaksud untuk menghentikan sikap diskriminatif terhadap etnis Tionghoa karena merupakan bagian masyarakat Indonesia dan untuk memberikan hak asasi kepada etnis Tionghoa dalam berbagai bidang.
4. Kebijakan menyelesaikan permasalahan gerakan separatisme di Aceh dan Papua. Kebijakan yang diambil Gus Dur dalam menangani separatisme tidak menggunakan militer dan terfokus kepada upaya membangun dialog untuk menyelesaikan permasalahan. Kebijakan tersebut berhasil membuat Aceh dan Papua masih bertahan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pluralisme yang diterapkan Gus Dur selama masa pemerintahannya menunjukkan bahwa pluralisme sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat dan berusaha untuk menerima berbagai macam perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia. Gus Dur menunjukkan bahwa pluralisme merupakan solusi yang dibutuhkan Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pemikiran pluralism Gus Dur masih relevan sampai dengan saat ini mengingat kasus intoleransi berskala lokal dan nasional masih terjadi.

KESIMPULAN

Pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari pengaruh dari ayahnya, Wahid Hasyim sejak tahun 1949-1953 dan kebiasaan membaca Gus Dur dari masa kecil. Faktor eksternal dipengaruhi oleh tiga ruang, tiga waktu dan tiga tempat yaitu pesantren (1957-1963), Timur Tengah (1963-1970) dan Eropa (1970-1971). Pluralisme Gus Dur mempunyai tiga komponen utama yaitu monoteisme (*tauhid*), hukum (*fiqh*), dan etika (*akhlak*). Pluralisme dipraktekkan Gus Dur hingga menjadi presiden pada tahun 1999. Kebijakan Gus Dur sebagai seorang presiden periode 1999-2001 mengedepankan pluralisme. Namun tidak semua

kebijakan seperti penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, rekonsiliasi dengan korban-korban yang dianggap terlibat PKI, memperjuangkan hak asasi etnis Tionghoa, dan menangani permasalahan separatisme di Aceh dan Papua berjalan lancar dan dapat diterima semua masyarakat Indonesia.

Pada artikel ini masih terdapat beberapa keterbatasan informasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber dan waktu. Keterbatasan sumber dalam artikel ini disebabkan karena kesulitan mengakses beberapa perpustakaan, kantor arsip dan beberapa lokasi lainnya karena adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Keterbatasan waktu dalam artikel ini disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem PPKM, PSBB dan upaya lain untuk menekan angka penyebaran covid-19. Penelitian selanjutnya dalam penulisan artikel ini akan difokuskan mengenai sikap Gus Dur dalam menangani kasus *Buloggate* dengan mengedepankan pemikiran pluralisme yang berakhir dengan pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, A. A. (2000). *Rakyat Indonesia Menggugat Gus Dur*. Wihdah Press.
- Barton, G. (2002). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. LKiS.
- Bauto, L. M. (2016). Perspektif Agama Dan Kebudayaan Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2). <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Chaerudin. (2011). *Jasa-Jasa Presiden Republik Indonesia*. Hamuda Prima Media.
- Dirdjosisworo, S. (1999). *Aspirasi dan Sikap Politik Gus Dur di Tengah Reformasi Menuju Indonesia Baru*. Mandar Maju.
- Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. *World Politics*, 9(3). <https://doi.org/10.2307/2008920>
- Gunawan, B. (2018). *Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur*. Kompas Media Nusantara.
- Hara, A. E. (2001). The Difficult Journey of Democratization in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 23(2). https://doi.org/10.1355/cs23_2g
- Ibad, M. N. F. A. (2012). *Bapak Tionghoa Indonesia*. LKiS.
- Ichtiyanto. (2005). *Masyarakat Majemuk dan Kerukunan Hidup Beragama dalam Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI.
- Ichwanuddin, W. H. S. (2014). *Pengawasan DPR Era Reformasi: Realitas Penggunaan Hak Interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat*. LIPI Press.
- Ma'ruf, A. (2019). Konsep Pemikiran Humanisme Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto. *Skripsi FTIK IAIN Purwokerto*.

- Mibtadin. (2021). *Manusia, Agama, dan Negara, Refleksi Pemikiran Gus Dur*. Gerbang Media Aksara.
- Nashir, I. J. (2012). *K.H. Abdurrahman Wahid, Negara, dan Kebijakan Non-Diskriminasi; Studi Terhadap Kebijakan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Intitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Notosusanto, N. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu Pengalaman*. Yayasan Idayu.
- Pekei, T. (2013). *Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua: Hidup Damai Lewat Dialog*. Pustaka Sinar Harapan.
- Rifai'i, M. (2019). *Islam Nusantara Perspektif Abdurrahman Wahid: Pemikiran dan Epistemologinya*. Literasi Nusantara.
- Rustina, Y. (2008). *Kebijakan Politik Gus Dur sebagai Presiden ke-4 terhadap Referendum Aceh*. Universitas Islam Negeri Syarif Hodayatullah.
- Schefold, R. (2013). The domestication of culture; Nation-building and ethnic diversity in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 154(2). <https://doi.org/10.1163/22134379-90003898>
- Shihab, A. (2005). *Nilai-nilai pluralisme dalam Islam: Bingkai gagasan yang berserak*. Nuansa.
- Sjamsudin, H. (1996). *Metode Penelitian Sejarah*. Depdikbud Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Suaedy, A. (2018). *Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001*. Gramedia Pustaka Utama.
- Taufani. (2018). Pemikiran Pluralisme Gus Dur. *Jurnal Tabligh Sosiologi Agama*, 19(2), 198–217.
- Wahid, A. (1999). *Prisma Pemikiran Gus Dur*. LKiS.
- Wahid, A. (2010). *Membaca Sejarah Nusantara: 25 Kolom Sejarah Gus Dur*. LKiS.
- Wicaksana, A. W. (2018). *Gus Dur: Jejak Bijak Sang Guru Bangsa*. C-Klik Media.
- Yusalia, H. (2008). *Pluralisme Beragama di Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid*. UIN Raden Fatah.